



**BANTUAN SEBAGAI INSTRUMEN KEBIJAKAN LUAR NEGERI:  
KEPENTINGAN DI BALIK BANTUAN PENDIDIKAN AUSTRALIA UNTUK  
MADRASAH DI INDONESIA, 2011-2015**

Sarah Litani Harahap

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

**ABSTRACT**

Foreign aid as one of the most prominent instrument on foreign policy, defined as national interest by Australia, particularly to protect their national security from any foreign or third-party threats. Australia's foreign aid began since 2004 to madrasah in Indonesia, after terrorist attack happened in five consecutive year (2001-2005) in Indonesia with a target of statehood Australian symbolic. It was later found that the terrorist group is affiliated with radical Islamic group named Jamaah Islamiyah, with madrasah as their educational background. It's impacted in Australia's askance point of view on madrasah as a place where Islam radical was taught. Through the Education Sector Support Program (ESSP), given by Australia to 1500 madrasah wich was selected, is not not only to improve madrasah accreditation, but also to prove Australia's interest to protecting their nationality.

**Keywords:** *foreign aid, national interest, national security, Australia, Indonesia, terrorism, ESSP, radical Islamic, madrasah*

**PENDAHULUAN**

Australia sejak tahun 2000 telah tergabung sebagai salah satu dari 200 negara yang berkomitmen untuk berperan di dalam keanggotaannya sebagai pemimpin dunia yang tergabung dalam MDGs (Millenium Development Goals). Negara-negara anggota MDGs berkewajiban untuk memberikan bantuan pembangunan internasional kepada negara-negara yang membutuhkan utamanya negara-negara berkembang. Kelompok negara-negara ini disebut Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Sesuai dengan apa yang telah ditargetkan bersama dengan ke-200 negara anggota MDGs, Australia menjadi wadah OECD yang berkomitmen untuk mencapai tiga target utama, yaitu "*targets for the eradication of poverty and gender inequality, and the achievement of universal education, health and environmental sustainability by 2015*" (Carr, 2013:9).

Bantuan luar negeri Australia yang berupa Program Bantuan Pembangunan Internasional (Australia's International Development Assistance Program) sering disebut dengan AusAID (Australian Agency for International Development), merupakan badan khusus yang dibuat oleh Australia untuk mencapai tujuan strategis MDG's, kedalam program bantuan luar negeri, sebagai negara pendonor, dengan memberikan Official Development Assistance (ODA) kepada negara penerima bantuan atau Country Programmable Aid (CPA). Australia menargetkan pengeluaran dana ODA yang akan dikeluarkan untuk bantuan pembangunan internasional pada tahun 2013-2014 sebesar 0.37% dari *gross national income* (GNI)-nya.

Pemerintah Australia telah menyediakan estimasi biaya sebesar A\$5,666 juta untuk ODA. Dengan rincian dana sebesar A\$4,944 juta akan dialokasikan untuk program AusAID dan sisanya sebesar A\$801 juta akan digunakan untuk urusan administrasi departemen pemerintah Australia yang lain. Australia juga terus berkomitmen untuk meningkatkan anggaran bantuan luar negerinya agar sampai mencapai 0.5% dari Growth National Income (GNI)-nya di tahun 2017-2018 (Carr, 2013).

Di tahun 2013-2014, Australia telah melakukan kerjasama bilateral dengan lebih dari 30 negara di dunia. Australia juga telah membantu 120 negara lebih di kawasan regional dan program global untuk mencapai MDGs (Carr, 2013). Berdasarkan Annual Report Budgetary on Australia's International Development Assistance Program 2013-2014 yang salah satunya berisi tentang data total pendanaan ODA untuk negara tetangga dan negara kawasan, dapat terlihat bahwa Australia telah membantu banyak negara, dengan dua rincian, yaitu: pertama, *Country Program Allocations*, merupakan program pengalokasian dana ODA yang ditujukan kepada negara-negara yang masuk dalam daftar penerima ODA yang dikelompokkan menjadi beberapa kawasan, contohnya: negara kawasan Asia Timur, kawasan Pasifik, kawasan Asia Selatan dan Barat, kawasan Afrika dan Timur Tengah, dan terakhir kawasan Amerika Latin dan Kepulauan Karibia; rincian yang kedua, *Global and Other Government Department (OGD)* yaitu program pengalokasian dana International Development Assistance (IDA) dengan melakukan kerjasama multilateral dengan organisasi-organisasi internasional, contohnya: Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, PBB, WHO, dan lain-lain.

Kemudian berdasarkan data dari Annual Report Budgetary on Australia's International Development Assistance Program 2013-2014, peringkat negara penerima bantuan luar negeriberdasarkan kawasannya, maka kawasan Asia Timur menjadi kawasan penerima bantuan terbanyak dengan kisaran bantuan mulai dari A\$ 1,200 juta - A\$ 1,400-an juta (86% dari GNI) yang kemudian di ikuti oleh kawasan Pasifik, Afrika dan Timur Tengah, Asia Barat dan Selatan, dan yang menduduki peringkat terakhir adalah kawasan Amerika Latin dan Kepulauan Karibia yang hanya mendapatkan nilai bantuan sebesar A\$ 30 juta - A\$ 50-an juta, bahkan setiap tahunnya kawasan Amerika Latin dan Kepulauan Karibia mengalami pengurangan dana bantuan ODA. Sedangkan peringkat negara yang mendapatkan bantuan AusAID terbanyak diduduki oleh Indonesia dengan jumlah anggaran bantuan A\$ 500 juta - A\$ 640-an juta, itu berarti lebih dari 50% anggaran dana bantuan untuk kawasan Asia Timur telah dialokasikan untuk Indonesia, bahkan anggaran yang dialokasikan untuk Indonesia pun terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sesuai dengan data dari Summary of Australia's Overseas Aid Program 2013-14. Dalam laporan tersebut tertulis bahwa anggaran bantuan Australia ke Indonesia di tahun 2013 sebesar A\$541.6 juta meningkat menjadi A\$646.8 juta ditahun 2014.

Berdasarkan data dari Aidworks: Actual Expenditure, and Best Estimate, Australian Aid Program Performance Report 2013-2014 tentang estimasi pengeluaran anggaran program bilateral Australia dalam AusAID ditahun 2013-2014 dapat dilihat bahwa pengeluaran dana terbesar dialokasikan untuk bidang pendidikan. Hal tersebut didasari oleh keprihatinan pemerintah Australia terhadap kesenjangan pendidikan, terutama yang terjadi di Indonesia ketika melihat data statistik yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan Nasional Indonesia saat itu, Prof. Mohammad Nuh yang mengatakan, hanya 75% anak Indonesia yang mendapatkan wajib pendidikan penuh selama sembilan tahun. Hanya satu dari 45 anak yang mendapatkan pendidikan yang baik. Sedangkan sebagian lainnya yang berada dikisaran umur 13-15 tahun (kelas 7-9) tidak mampu melanjutkan jenjang ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) dikarenakan biaya sekolah yang sangat mahal, jarak sekolah yang terlalu jauh, dan rendahnya kualitas pengajar (Naskah pidato Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam Kemendikbud, 2013:3). Berdasarkan itu pemerintah Indonesia dan Australia berkerjasama untuk memperbaiki pendidikan dalam mewujudkan program wajib belajar sembilan tahun

agar dapat berjalan sebagai mana mestinya. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengalokasikan 20% dari anggaran dana AusAID, dialokasikan untuk bidang pendidikan dan dijadikan prioritas utama.

James Gilling, Kepala Pengembangan Program Kerja Sama Australia di Indonesia untuk Kedutaan Besar Australia di Jakarta, mengatakan “Program kami bertujuan untuk memberi mereka kesempatan yang sama bagi siswa-siswi madrasah agar bisa meraih kesuksesan seperti siswa-siswi lain. Sering kali, madrasah satu-satunya sekolah yang tersedia bagi anak-anak miskin di Indonesia” (Pidato kenegaraan dalam Kemtiraan Pendidikan, 2012).

Bantuan dana pendidikan kepada madrasah yang diberikan Australia berada di bawah program strategis MDGs tentang “*Promoting Opportunities For All*” di bawah pengawasan badan ODA AusAID yang dinamai Australia’s Education Partnership with Indonesia (AEPI) mengalokasikan dana sebesar A\$ 524 juta sampai program ini berakhir. Tujuan program bantuan ini adalah membangun sekolah di banyak tempat baru, meningkatkan sistem nasional untuk peningkatan pengelolaan sekolah, mencetak pemimpin profesional sejak dini untuk masa depan bangsa Indonesia, meningkatkan mutu pendidikan di 250 daerah, dengan meningkatkan pendidikan di 1.500 madrasah agar sesuai dengan standar nasional, peningkatan kualitas, dengan mendukung dasar-dasar pembuatan kebijakan nasional Indonesia dan memprogramkan reformasi pendidikan melalui para ahli (Australian Development Assistance, 2014).

Indonesia sebagai satu-satunya penerima bantuan sekolah berlatar belakang agama juga tertera di dalam Annual Report Budgetary Australia’s International Development Assistance Program 2013-14. Berdasarkan laporan tersebut negara-negara penerima bantuan AusAID di bidang pendidikan selain Indonesia mendapatkan dana bantuan pendidikan yang dianggarkan, dialokasikan untuk sekolah umum reguler, bukan sekolah berlatar belakang khusus (agama) seperti yang Australia alokasikan ke Indonesia. Hal ini terlihat jelas, dimana dalam laporan tersebut hanya Indonesia lah yang secara transparan dijelaskan bahwa bantuan pendidikan yang diberikan, adalah untuk sekolah berlatar belakang agama, dengan penggunaan kalimat sebagai berikut “*Australia is also supporting the improvement of education quality in Islamic schools, known as madrasah...*”. Sedangkan negara-negara lainnya seperti Iraq, Palestina, Pakistan, hanya dijelaskan sebagai bantuan pendidikan secara umum dengan menggunakan kalimat “*Australia’s support will help to improve access to and the quality of educational opportunities for children and youth...*”. Bahkan negara kawasan Timur Tengah yang identik dengan Islam, justru tidak mendapatkan bantuan untuk pendidikan, melainkan bantuan ekonomi, kemanusiaan, upaya penyelesaian konflik dan sejenisnya.

Jika ditelusuri lebih dalam, mengapa jumlah persentase madrasah yang diberi bantuan pendidikan lebih banyak dibandingkan dengan persentase sekolah reguler. Sedangkan banyak sekolah-sekolah umum reguler di Indonesia terutama di pelosok negeri yang masih bernasib sama dengan madrasah, sama-sama jauh dibawah kata layak untuk dijadikan tempat menimba ilmu bagi siswa-siswanya karena sama-sama tidak memenuhi delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, juga menyatakan bahwa sampai saat ini, 88,8 persen sekolah di Indonesia, mulai tingkat SD hingga SMA/SMK, belum melewati mutu standar nasional pendidikan (Kompas, 2011). Berdasarkan data yang ada, 40,31 persen dari 201.557 sekolah di Indonesia di bawah Standar Pelayanan Minimal (SPM), sedangkan 48,49 persennya berada pada posisi SPM. Hanya 10,15 sekolah yang memenuhi standar pelayanan minimal.

Maka berdasarkan fakta-fakta di atas, bantuan yang diberikan Australia kepada madrasah di Indonesia sangat menarik untuk diteliti. Alasan Australia’s Education Partnership with Indonesia yang diprogramkan oleh pemerintah Australia dinilai oleh penulis tidak relevan jika hanya mengedepankan kepentingan pendidikan Indonesia saja. Lalu apa

untungnya bagi pemerintah Australia. Apakah ada kepentingan yang pemerintah Australia sembunyikan dibalik bantuan pendidikannya.

Tujuan negara pendonor termasuk Australia, dalam memberikan bantuan pada umumnya adalah untuk pencapaian keamanan nasional, sehingga bantuan yang diberikan oleh Australia disinyalir oleh penulis juga merupakan bentuk upaya pencapaian keamanan nasional Australia. Seperti yang tercantum dalam lima upaya pemerintah Australia dalam memberikan bantuan melalui AusAID yang salah satunya adalah upaya untuk mencapai *security* (keamanan) yakni untuk memperkuat keamanan regional, dan meningkatkan stabilitas negara dalam hal lintas batas negara dari segala macam bentuk ancaman yang mengganggu (AusAID, 2011). Sehingga bantuan yang Australia berikan untuk madrasah dapat diartikan sebagai aksi dari pemerintah Australia untuk mencapai keamanan nasionalnya agar terhindar dari ancaman yang berasal dari madrasah. Lalu apa yang membuat pemerintah Australia merasa terancam dengan keberadaan madrasah. Apakah ini merupakan aksi dari Pemerintah Australia pasca tragedi Bom Bali 1 yang banyak menewaskan warga negaranya, yang membuat Australia merasa keamanan nasional terancam oleh aksi terorisme para teroris. Ditambah lagi awal munculnya berbagai rentetan bantuan yang Australia berikan kepada madrasah baru dimulai sejak pasca kejadian 9/11 dan Bom Bali 1 tersebut, disinilah muncul kejanggalan, apakah ini merupakan upaya pemerintah Australia dalam menerapkan prinsip *Global War on Terror* kepada madrasah untuk ikut serta dalam upaya mengurangi pergerakan-pergerakan Muslim fundamentalis yang mampu mengarah pada tindakan terorisme di Indonesia, agar Australia terhindar dari ancaman para pelaku teroris pasca merebaknya informasi bahwa pelaku pengeboman adalah lulusan madrasah.

Dengan memberikan bantuan kepada madrasah, ini merupakan cara terbaik yang pemerintah Australia lakukan agar lebih mudah mengawasi madrasah supaya terbebas dari tindakan dan paham Islam radikal maupun ekstrimisme, sehingga tidak akan ada lagi lulusan-lulusan madrasah yang tergabung dalam kelompok teroris.

## **PEMBAHASAN**

### *Sejarah Perkembangan Kurikulum dan Pembinaan Madrasah Di Indonesia.*

Sebelumnya diterangkan bahwa Indonesia merupakan satu-satunya negara yang menerima bantuan pendidikan dari pemerintah Australia untuk sekolah yang memiliki kekhasan agama Islam yaitu madrasah. Selanjutnya akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai perkembangan Islam di Indonesia. Karena Islam merupakan agama yang menjadi pondasi kelahiran madrasah.

Menurut Suryanegara (2009:31-37) Islam masuk ke Indonesia, dibagi menjadi tiga teori besar. Pertama, Teori Gujarat, Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 M, yang berasal dari Gujarat (India) melalui para pedagang Muslim India. Kedua, Teori Persia, Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 M, yang berasal dari Persia melalui para pedagang Muslim Persia, yang saat dalam perjalanannya singgah ke Gujarat dahulu sebelum memasuki Indonesia. Ketiga, Teori Makkah, Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 M, langsung dari negeri Timur Tengah melalui para pedagang Muslim Arab. Masuknya Islam ke negara-negara di seluruh dunia disebut sebagai Islamisasi (Permana, 2010). Daerah pertama yang dimasuki Islam adalah daerah perbatasan Indonesia terluar yaitu pesisir Sumatera Utara. Kerajaan Islam di Indonesia pertamakali di dirikan di Aceh, sebab itulah Aceh dikenal juga dengan sebutan serambi Makkah. Persebaran agama Islam di Indonesia yang dikenal dengan cara berdakwah, saat itu disebarkan secara damai melalui para Kyai dan Dai yang mayoritas adalah para pedagang (Al-Usairy, 2003:336).

Proses Islamisasi di Indonesia dimulai saat aktivitas lalu lintas jalur perdagangan Internasional antara negeri bagian Barat, Tenggara, Timur dan Asia berlangsung. Para pedagang Muslim (Arab, Persia, India), yang sering berinteraksi dengan warga lokal,

menimbulkan suatu jalinan yang sangat harmonis di antara masyarakat Indonesia. Sehingga mereka menggunakan waktu transisinya, baik untuk sementara maupun untuk menetap, untuk mengajarkan agama Islam. Pemukimam pedagang Muslim dari negeri-negeri asing disebut pekojan (Tjandrasasmita, 1984:200-201).

Seiring terus berkembangnya persebaran Islam di Indonesia yang sangat positif, rupanya memunculkan cara baru dalam perkembangannya. Yaitu, dengan cara menyebarkan Islam lewat pendidikan. Para ulama, guru agama, dan raja-raja sangat berperan besar dalam proses penyebaran agama Islam ini. Pengaruh mereka yang besar, sangat mudah membuat masyarakat untuk ikut serta dalam hal-hal yang mereka ajarkan. Pada saat itu, jalur pendidikan untuk memperkenalkan Islam kepada masyarakat ditempuh dengan cara mendirikan pondok pesantren sebagai wadah pendidikan, meski awalnya hanya di surau-surau (Dhofier, 1982). Sejak saat itulah mulai dikenal tentang pelajaran agama Islam sebagai pedoman pendidikan.

Agama Islam di masyarakat sempat mengalami pasang surut, dan tak sedikit penolakan yang terjadi. Bahkan pada saat masuknya para pedagang dari eropa, persebaran agama Islam dipersulit. Namun hal tersebut tak berlangsung lama karena pasca Kemerdekaan yaitu pada masa Orde Baru, agama Islam mulai di pandang penting, hal ini di tandai dengan dijadikannya beberapa ulama besar Islam di kursi pejabat pemerintahan. Masuknya Islam ke Indonesia, memberikan pengaruh positif, mulai dari birokrasi hingga persoalan ekonomi, sosial, budaya, politik, pertahanan bahkan keamanan, sebagai berikut: pertama, bidang birokrasi dan hukum : mengenal *kitabun nikah* (panduan pernikahan, serta syarat-syarat di dalamnya, yang saat ini di urusi oleh Kantor Urusan Agama), lalu surat tanah, sistem persidangan, bahkan di Aceh mempunyai UUD Islam (Kitab Adat Mahkota Alam), cara bertata negara sejak jaman kerajaan, muncul larangan pelacuran dan peredaran minuman keras serta penentuan hukuman bagi para terpidana seperti hukuman kisas.

Kedua, Bidang ekonomi: mengenal sistem kelembagaan mitra dagang, permodalan, hukum syariah dan riba, mata uang emas, dan lain-lain. Ketiga, Bidang sosial dan pendidikan : mengenal toleransi, mulai membangun hubungan dengan negara lain, muncul sistem pendidikan Islam (madrasah dan pondok pesantren) mulai dari pendidikan kanak-kanak (Raudathul Athfal/RA), hingga pendidikan di perguruan tinggi, mencetak jiwa-jiwa nasionalis. Keempat, Bidang budaya: mengenal seni kaligrafi, wayang, syair dan puisi, hikayat, dan lain-lain.

Kelima, Bidang politik : mengenal partai politik, partai politik Islam pertama (Nahdlatul Ulama, Masyumi, dan Syarikat Islam Indonesia), banyak para kyai dan ulama dijadikan pemangku kekuasaan, mengenal politik dagang, dan lain-lain. Keenam, Bidang pertahanan dan keamanan : mengenal strategi oprasi militer dan perang dalam mempertahankan kedaulatan NKRI.

Perkembangan Islam di Indonesia sampai saat ini masih sangat baik, hingga pada akhirnya muncul istilah Islamophobia dalam kehidupan masyarakat lokal dan Internasional, setelah kejadian penyerangan bom oleh kelompok teroris yang mengatas namakan Islam di Amerika pada 11 September 2001 (dikenal sebagai tragedi 9/11). Ketakutan masyarakat Internasional terhadap Islam dan umat Muslim sangat berpengaruh terhadap pandangan dunia Internasional pada Indonesia sebagai negara Islam ketiga di dunia. Hal tersebut juga sangat berpengaruh terhadap pendidikan berbasis Islam (madrasah dan pondok pesantren). Banyak pihak yang ingin menekan nilai-nilai Islam dalam kurikulum dan materi yang diajarkan pada madrasah dan pondok pesantren (Abu Bakar, 2008).

Seiring dengan perkembangan dunia pendidikan sejarah awal perkembangan pendidikan Islam di Indonesia khususnya mengenai Perkembangan Pendidikan Agama Islam (PAI) sudah dimulai sejak awal abad XVII M (17 Masehi atau tahun 1700an), terjadi perkembangan yang cukup drastis sejak agama Islam masuk di Indonesia dimulai sejak masa

penjajahan (sebelum meredeka), Orde Lama dan terus berkembang hingga masa Orde Baru sampai sekarang (Kementerian Agama RI, 2015). Pada era Orde Lama perkembangan madrasah mengalami kemajuan di bidang ilmu umum dimana penambahan ilmu non-agamasangat diunggulkan. Namun tidak bagi bidang ilmu keagamaan, yang justru mengalami kemunduran, dimana jam mata pelajaran agama justru terus berkurang dan dibatasi sehingga semakin menjauhi ide awal pembuatan sekolah berbasis pendidikan agama yaitu madrasah. Namun semua itu mulai membaik, karena pemerintah merasa bahwa militansi Islam di Indonesia cukup besar, sehingga perlu bagi pemerintah untuk mendukung perkembangan agama Islam sebagai salah satu upaya melindungi stabilitas nasional.

Selama madrasah berdiri di Indonesia, dimana awalnya hanya berupa pendidikan di surau-surau hingga sekarang sudah memiliki legalitas dan pengakuan dari masyarakat dan pemerintah. Itu semua merupakan bentuk perjuangan dari masyarakat Islam untuk mempertahankan keberadaan madrasah. Hal ini sekaligus menunjukkan betapa sangat diperjuangkannya pendidikan agama Islam di Indonesia ini. Berbagai penolakan mengenai pendirian madrasah tak hanya datang dari dalam negeri, namun juga dari luar negeri. Seperti penolakan dari para kolonial, dengan cara membuat kebijakan-kebijakan yang memperlambat perkembangan madrasah, serta memberikan bantuan-bantuan agar muncul rasa balas budi, dan mengangkat para priyayi dan ulama besar agama untuk menjabat di kantor Urusan Agama, sehingga pendirian madrasah dan hal-hal yang berbau Islam bisa lebih diatur oleh para kolonial. Ketakutan kolonial akan militansi kelompok Islam, dan pemikiran Islam yang dianggap radikal dianggap sebagai ancaman jika sampai madrasah terus berkembang. Kekhawatiran tersebut terus berlanjut hingga sampai pemerintah Indonesia pun secara tidak langsung terpengaruh oleh kekhawatiran tersebut. Perubahan kurikulum madrasah yang semakin modern sebetulnya memiliki sisi positif dan negatif. Positif karena saat ini madrasah dan lulusannya sudah mampu bersaing dan sejajar dengan sekolah umum. Namun negatifnya adalah, pendidikan agama Islam di madrasah saat ini mulai pudar.

#### *Memahami Bantuan Education Sector Support Program (ESSP) Untuk Indonesia*

Program ESSP memiliki dampak baik bagi akreditasi dan peningkatan kualitas mutu madrasah, utamanya dalam menyejajarkan madrasah dengan sekolah publik formal yang berada di bawah bimbingan Kemendikbud. Namun perlu disadari bahwa seiring banyaknya madrasah yang menuju standar pelayanan minimum pendidikan dan delapan standar akreditasi nasional, maka semakin banyak pula madrasah-madrasah yang dipaksa untuk mau mengikuti aturan dalam melaksanakan rencana kerja yang telah disepakati, yang mana di antaranya adalah wajib untuk mengadopsi syarat-syarat berikut: (1) mengganti kurikulum madrasah dengan kurikulum standar nasional; serta (2) menerapkan Toleransi, Pluralisme, dan Inklusifisme (TPI): (a) bukan madrasah yang mengajarkan tentang atau berafiliasi dengan paham/aliran keras (anarkisme/radikalisme); (b) pengelola madrasah tidak memiliki pandangan negatif terhadap isu TPI; (c) tidak ada pengelola madrasah yang berafiliasi dengan aliran keras; (d) tidak ada alumni madrasah yang terkait aliran keras; (e) tidak ada bantuan atau kerjasama dengan organisasi aliran keras; (f) tidak ada kegiatan ekstrakurikuler/slogan mengarah aliran keras; (g) tidak ada kitab/buku keagamaan yang bertema aliran keras.

Sehingga, berdasarkan syarat-syarat wajib di atas, semakin lama nilai-nilai Islam yang diajarkan di dalam madrasah akan semakin pudar, karena harus mengikuti perubahan kurikulum, zaman, dan perkembangan yang ada, inilah motif yang ingin pemerintah Australia capai dalam mengkampanyekan *Global War on Terrorism*. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Seksi Kerjasama Kelembagaan Kementerian Agama RI, bahwa “secara kuantitas saat ini, bisa dikatakan bahwa pendidikan Islam di madrasah menurun, hal ini merupakan konsekuensi yang harus diambil jika madrasah tetap ingin sejajar dengan sekolah umum di

bawah binaan Kemendikbud(wawancara dengan Abdullah Faqih, Kepala Seksi Kerjasama Kelembagaan Direktorat Pendidikan Madrasah, 14 Maret 2016).

Dari berbagai penjelasan di atas, maka jelas bahwa bantuan dana hibah Australia dalam program ESSP komponen III memang memiliki kepentingan dengan motif untuk mencapai kemandirian nasional Australia dari ancaman teroris. Misalnya, sepertimewajibkan madrasah penerima bantuan untuk berkomitmen terhadap isu TPI, mengubah kurikulumnya agar sesuai dengan standar kurikulum nasional, yang kemudian berhasil untuk mensekularisasi madrasah sebagai sekolah dengan kekhasan Islam yang selalu dianggap sebagai tempat pencetak teroris. Sehingga kurikulum serta ilmu-ilmu tambahan diluar ilmu agama Islam baik akademis maupun non-akademis terus dimasukkan ke dalam kurikulum madrasah, yang berdampak pada berkurangnya jam mata pelajaran agama Islam secara terus-menerus. Itulah yang diharapkan orang-orang Barat termasuk Australia, sebab pandangan mereka terhadap ajaran agama Islam adalah ajaran radikal yang melahirkan pemikir-pemikir fundamental yang kemudian mencetak para teroris baru, sehingga akan lebih baik jika jam mata pelajaran agama Islam dikurangi dan digantikan dengan pelajaran-pelajaran yang bersifat umum.

Dipilihnya madrasah sebagai penerima bantuan tersebut adalah pertama, sebagai bentuk dari rasa kekhawatiran Australia yang keamanannya terancam oleh tindakan radikal teroris, yang belakangan diketahui bahwa pelaku pengeboman memiliki latar belakang pendidikan di madrasah, sehingga Australia menganggap bahwa madrasah merupakan wadah pendidikan yang mengajarkan pemikiran Islam radikal. Sebab itulah Australia, merasa perlu untuk memberikan bantuan kepada madrasah untuk meredam perkembangan Islam radikal. Meski pada kenyataannya, 1.500 madrasah yang mendapat bantuan ESSP komponen III tak satupun masuk dalam kategori madrasah radikal. Artinya bahwa madrasah bersih dari ajaran Islam radikal, madrasah justru mengajarkan Islam moderat. Pihak Kemenag juga menyatakan bahwa “madrasah di Indonesia itu *committed* terhadap prinsip Islam moderat, bukan radikal, yang radikal itu hanya oknum-oknum tertentu, bukan madrasah nya” (wawancara dengan Abdullah Faqih, Kepala Seksi Kerjasama Kelembagaan Direktorat Pendidikan Madrasah, 14 Maret 2016).

Alasan kedua, disertakannya madrasah sebagai salah satu penerima bantuan ESSP adalah karena rencana peningkatan mutu madrasah masuk dalam Rencana Strategik Pembangunan Pendidikan Islam 2010-2014. Sehingga Kemenag mengajukan madrasah sebagai salah satu penerima bantuan, dan akhirnya terealisasi dalam program ESSP komponen III untuk meningkatkan akreditasi madrasah, dengan tujuan agar 50% madrasah bisa terakreditasi di tahun 2014 dengan nilai akreditasi minimal B. Kedua pihak menyetujui alasan ini, dan berbuah baik saat laporan data hasil evaluasi dari bantuan ESSP komponen III di tahun 2013 cukup memuaskan, dengan 87% madrasah sudah terakreditasi.

Madrasah yang semakin moderat merupakan hal yang baik bagi kedua negara. Namun hal tersebut memberikan efek pada berkurangnya jam mata pelajaran agama Islam demi mengejar ketertinggalan madrasah dari sekolah umum, dengan lebih banyak memasukkan mata pelajaran umum ke dalam kurikulum madrasah. Kemudian memberikan pelatihan-pelatihan yang bersifat akademis maupun non- akademis, demi menunjang penyejajaran madrasah dengan sekolah umum yang disebut dengan sekularisasi madrasah (Kementerian Agama RI, 2016).

Pada Bab selanjutnya akan di jelaskan lebih spesifik mengenai maksud dan tujuan dari program ESSP komponen III kaitannya dengan keikutsertaan Australia dalam menyuarakan kampanye internasional terhadap perang melawan terorisme (*Global War on Terrorism/GWoT*).

### *Kepentingan Australia dalam Bantuan ESSP di Indonesia*

Australia sebagai negara Persemakmuran Inggris, yang juga bersekutu dengan AS mengalami perubahan arah kebijakan yang awalnya mengarah pada perbaikan ekonomi pasca PD II menjadi berfokus pada ranah pertahanan dan keamanan. Hal ini diprakarsai pasca tragedi 9/11, yakni pengeboman yang dilakukan oleh kelompok teroris Al-Qaeda di AS. Australia sebagai sekutu terloyal AS setelah Inggris ikut mengumandangkan kampanye besar AS dalam kerangka *Global War on Terrorism*, yang kontra terhadap terorisme.

Hal tersebut membuat Australia sangat aktif dalam berbagai kegiatan perang melawan teroris. Hingga pada akhirnya Australia menjadi korban dalam berbagai penyerangan kelompok terorisme. Penyerangan tersebut sebagai bentuk perlawanan teroris terhadap tindakan-tindakan menentang Australia. Kejadian demi kejadian, yang kebanyakan diantaranya adalah aksi pengeboman yang dilakukan di Indonesia dengan target sasaran simbol-simbol kenegaraan Australia, seperti kedutaan besar Australia, warga negara Australia dan lain-lain, membuat Australia merasa keamanan warga negara dan keamanan nasionalnya terancam.

Berbagai kebijakan dibuat oleh pemerintah Australia untuk melindungi warga negaranya dari kontak dengan terorisme khususnya terorisme yang berada di Indonesia. Kebijakan "*Travel Warning*" yang diperuntukkan kepada seluruh warga Australia mengenai peringatan untuk tidak berpergian ke Indonesia, secara jelas menunjukkan rasa kurang percaya Australia terhadap Indonesia yang menganggap Indonesia memiliki potensi ancaman bagi negaranya. Kebijakan tersebut membuat hubungan kedua negara sempat merenggang, hingga akhirnya Australia mencabut kebijakan tersebut dengan syarat Indonesia mau berkomitmen untuk bersama-sama dengan Australia dan negara-negara dunia dalam perang melawan terorisme.

Sejak saat itulah, hubungan Indonesia-Australia mulai membaik. Banyak bantuan dan kerjasama yang dilakukan oleh kedua negara dalam upaya menanggulangi terorisme. Salah satu bantuan Australia yang sangat menarik untuk dibahas adalah bantuan ESSP, yang mana bantuan ini ditujukan kepada madrasah dengan mengharuskan madrasah sebagai penerima bantuan wajib memenuhi syarat yang telah ditentukan, yang salah satunya adalah untuk berkomitmen terhadap Toleransi, Pluralisme, dan Inklusifisme. Program bantuan ESSP yang pemerintah Australia berikan secara garis besar diperuntukkan untuk mencapailima upaya pemerintah Australia dalam memberikan bantuannya melalui AusAID yang salah satunya adalah upaya untuk mencapai *security* (keamanan) yakni untuk memperkuat keamanan regional, dan meningkatkan stabilitas negara dalam hal lintas batas negara dari segala macam bentuk ancaman yang mengganggu (AusAID, 2011). Hal ini menunjukkan bahwa bantuan ESSP memiliki motif untuk mencapai keamanan nasional Australia dengan menerapkan prinsip *Global War on Terrorism* terhadap madrasah yang pada gilirannya tindakan ini dapat dianggap sebagai aksi deradikalisasi madrasah meski dimaknai secara positif, hingga akhirnya aksi tersebut berimplikasi pada keamanan nasional Australia jangka panjang agar terbebas dari ancaman terorisme.

### **PENUTUP**

Berdasarkan analisis diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Australia memiliki motif kepentingan nasional terhadap bantuan kepada madrasah Indonesia sebagai upaya untuk perang global melawan terorisme (*Global War on Terrorism*), serta melindungi keamanan nasionalnya dari ancaman teroris. Australia yang merasa cemas dengan negara - negara tetangga (khususnya Indonesia) yang dijadikan objek/basis oleh kelompok-kelompok di luar negara yang terlibat dalam *transnational crime* (termasuk terorisme) telah menjadi ancaman yang berarti bagi Australia. Seperti pernyataan kekhawatiran yang disampaikan oleh Jaksa Agung Australia, George Brandis:



“tidak ada keraguan sama sekali bahwa Indonesia telah menjadi objek ambisi untuk ISIS (kelompok terorisme)...ISIS telah mengincar Indonesia menjadi lokasi untuk basis khilafahnya...ISIS memiliki ambisi untuk meningkatkan kehadirannya dan tingkat aktivitas di Indonesia, baik secara langsung atau melalui pengganti...kasus teror mengerikan bisa terjadi di Australia jika ISIS...menjadikan Indonesia sebagai basis khilafahnya” (Seputar Indonesia News, terbitan 22 Desember 2015).

Australia terbukti memasukkan syarat TPI (Toleransi, Pluralisme, Inklusifisme) ke dalam syarat wajib penyeleksian 1.500 madrasah Indonesia penerima bantuan yang dibuat oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Dalam peraturan syarat wajib ketentuan penerima bantuan tersebut, madrasah-madrasah penerima bantuan juga harus mengganti kurikulumnya dengan standar kurikulum nasional. Dari kedua ketentuan syarat tersebut, artinya baik pemerintah Australia maupun pemerintah Indonesia menghendaki madrasah yang plural dan sekular, tidak agamis yang kaku untuk selalu mengikuti hukum agama.

Ini yang diharapkan Australia dan sekutunya AS serta negara Barat lainnya, agar intensitas ajaran Islam yang dianggap radikal semakin berkurang diajarkan di madrasah, sehingga berimplikasi pada penurunan perkembangan teroris dan tidak radikal yang menguntungkan keamanan Australia serta keamanan internasional sebagai *common goals* dalam menciptakan perdamaian dunia yang terbebas dari segala bentuk dan aksi terorisme. Padahal, dalam sejarah perkembangan madrasah mulai dari sebelum kemerdekaan hingga saat ini tidak ada satupun madrasah yang masuk dalam kategori radikal, yang radikal hanyalah oknum-oknum tertentu.

Temuan penelitian ini sesuai dengan asumsi realis bahwa bantuan luar negeri dapat dianalogikan sebagai “*No free for lunch*”, artinya tidak ada makan siang gratis. Setiap bantuan luar negeri pasti memiliki kepentingan yang harus dipenuhi, meski kepentingan tersebut tak langsung ditunjukkan. Seperti yang Australia lakukan, melalui bantuan ESSP komponen III, secara tidak langsung bertujuan untuk memenuhi kepentingan nasionalnya dalam hal keamanan nasional agar terhindar dari segala jenis ancaman terorisme.

## Referensi

- Abu Bakar, Istianah. (2008). *Sejarah Peradaban Islam*. Malang: UIN Malang Press.
- Al-USairy, Ahmad. (2003). *Sejarah Islam: (Sejak Zaman Nabi Adam Hingga Abad XX)*. Jakarta: Akbar Media Ekasarana.
- Carr, Hon Bob. (2013). *Annual Report Budgetary on Australia's International Development Assistance Program 2013-2014 'Effective Aid: Helping The World's Poor'*. Australia: Government of Foreign Affairs.
- Dhofier, Zamachsyari. (1982). *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES.
- OECD. (2015). *Official Development Assistance Definition and Coverage*. <<http://www.oecd.org/dac/stats/officialdevelopmentassistancedefinitionandcoverage.htm>>. Diakses pada 11 Desember 2015.
- Muhaimin. (2015). *Australia: ISIS Incar Indonesia Jadi Basis 'Khilafah'*. <<http://international.sindonews.com/read/1071381/40/australia-isis-incar-indonesia-jadi-basis-khilafah-1450747447>>. Diakses pada 11 Mei 2016.
- Tjandrasasmita, Uka. (1984). *Sejarah Nasional Indonesia 3rd Edition*. Jakarta: PN Balai Pustaka.